

PENERAPAN PROGRAM KALIMASADA OLEH DISDUKCAPIL SURABAYA DI LINGKUP KELURAHAN

Rosantika

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
rosantika1234@gmail.com;

ABSTRAK

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan, antara lain, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindah Masuk, Pindah Keluar, Pecah KK, Perubahan Biodata, Pemuktahiran Gelar, Akta Pernikahan, Legalisir, dan KIA yang masih rendah. Membuat peneliti memilih subjek ini untuk dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang inisiatif yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai administrasi kependudukan, khususnya di wilayah kelurahan. Hal itu dilakukan dengan penerapan program Kalimasada. dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa dalam melaksanakan program tersebut. Metodologi kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan temuan kajian tersebut, program Kalimasada bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan baik bagi masyarakat bangsa maupun diri sendiri dapat berjalan sesuai rencana. Ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan program Kalimasada di Kelurahan, seperti tidak adanya fasilitas pendukung seperti tidak tersedianya komputer dan printer untuk Ketua RT Rintisan Kalimasada sebagai pendukung pelayanan kependudukan, dan sebagian masyarakat yang masih awam teknologi.

Kata kunci: *Kalimasada, Implementasi, Disdukcapil*

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Sangat penting kesesuaian data kependudukan sebagai penunjang upaya pembangunan nasional, data kependudukan tersebut didapatkan dari dokumen-dokumen penduduk. Namun sering kali masyarakat enggan untuk mengurus administrasi kependudukan. Urusan administrasi kependudukan (adminduk) adalah modal utama dalam pembangunan. Kalau tidak memiliki sistem adminduk yang akurat, maka menimbulkan ketidak efektifitan atau keakuratan data yang dimiliki sehingga proses yang dilakukan akan tidak sesuai, sebab apapun menyakut kependudukan membutuhkan data administrasi kependudukan (Publisher, 2022). Administrasi kependudukan proses penataan dan pengaturan pengeluaran dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi kependudukan, dan

pemanfaatan data yang dihasilkan untuk pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan (Setiyawan, 2017).

Masih banyak masyarakat yang mengabaikan makna penting administrasi kependudukan bagi mereka. Selain keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap prosedur mendapatkan dokumen kependudukan. Mereka juga mengagap bahwa pengurusan dokumen-dokumen kependudukan sangat ribet dan berbelit-belit di tambah dengan masih adanya praktik pungutan liar dari layanan publik yang membuat masyarakat enggan mengurus administrasi kependudukan dan hanya mengurus jika diperlukan dokumen kependudukan tersebut.

Pemerintah harus mengambil tindakan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pelayanan publik sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 menetapkan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pelayanan publik, seperti persyaratan pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan dalam pemberian pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan. Pegawai pemerintah seharusnya memberikan pelayanan publik di seluruh Indonesia sesuai dengan harapan masyarakat.

Pemerintahan Surabaya terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan bertanggung jawab. Demi meningkatkan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Pemerintah Surabaya melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan publik sebagai wujud mengikuti perkembangan jaman yang sudah digital dan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya ialah Disdukcapil Surabaya yang melakukan inovasi dalam pelayanan kependudukan yaitu Klampid New Generation (KNG) sebagai media pengajuan permohonan administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindah Datang, Pindah Keluar, KK, KTP dan KIA secara online (pemerintah kota surabaya, n.d.).

Dalam adanya inovasi KNG masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kependudukan melalui sistem online yang bisa diakses mandiri atau melalaui petugas kelurahan dan kecamatan. Namun masih kurangnya sosialisasi aplikasi KNG kepada masyarakat dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kepengurusan dokumen-dokumen kependudukan. Membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya (DISDUKCAPIL) membuat suatu program yaitu Kalimasada artinya Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan khususnya di wilayah lingkungan kelurahan.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin melalukan penelitian bagaimana implementasi program kalimasada oleh Disdukcapil Surabaya di lingkup kelurahan.

B. LANDASAN TEORI

Implementasi

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan. Definisi para ahli tentang implementasi adalah tindakan atau eksekusi yang cermat dan terperinci dari strategi yang telah ditetapkan. Biasanya, implementasi terjadi setelah perencanaan dianggap tetap.

Implementasi adalah istilah umum yang dapat berarti implementasi atau penerapan.

Kalimasada

Disdukcapil Surabaya meluncurkan Program Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk (Kalimasada) pada 18 November 2021 dengan menampilkan 62 RT Perintis (Dispendukcapil) Kalimasada. Dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif, inisiatif ini bertujuan untuk menawarkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) sebanyak mungkin. Karena model pengelolaan Adminduk memasukkan partisipasi aktif masyarakat, yang dengan sendirinya dapat meningkatkan kesadaran publik

Disdukcapil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya di wilayah Surabaya. Disdukcapil Surabaya melakukan berbagai tugas administrasi kependudukan seperti melayani permohonan, Akta Kelahiran, Akta perkawinan, Akta kematian, Pindah Datang, Pindah Keluar, KTP, Legalisir dan Kartu Indonesia Anak (KIA) dan lain-lain.

Kelurahan

Pada Undang-undang Peraturan Pemerintahan (PP) No. 73 Tahun 2005 terkait Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan ialah wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Juga suatu pemerintahan yang ada di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan bagian dari pembagian administratif di wilayah Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan secara akurat, factual dan sistematis suatu fenomena, peristiwa atau kejadian. Menggunakan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian dalam analisis data khususnya melalui reduksi, penyajian data yang diterangkan dalam bentuk rangkaian pertanyaan yang diteliti dan dikontrol, dimana kesimpulan dari penelitian kuantitatif adalah menemukan sesuatu yang baru atau baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini lebih kepada mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan program kalimasada dan bagaimana penerapan kalimasada di lingkup kelurahan khususnya Kelurahan Rungkut Menanggal

Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan Rungkut Menanggal yaitu di JL. Raya Rungkut Menanggal No. 11, Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293.

Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus – 24 Desember setara dengan 5 Bulan. Penelitian ini dibantu oleh 2 orang yang berasal dari Program Administrasi Negara atas penugasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator kinerja pemerintah yang paling nyata adalah pelayanan publik (Kurniawan, 2017). Berdasarkan layanan yang mereka terima, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah. Karena itu, standar pelayanan publik harus segera dinaikkan di semua kementerian dan organisasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan prima sebagai pelayanan yang mudah, terjangkau, cepat dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya meluncurkan Program Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk atau yang dikenal dengan Kalimasada untuk memberikan pelayanan kependudukan sederhana. Dengan adanya program Kalimasada, berbagai layanan Adminduk kini dapat ditangani oleh masyarakat setempat melalui lingkup Kelurahan, khususnya ketua RT setempat, menurut Walikota Eri Cahyadi. Dengan demikian, warga tidak perlu mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya (Risky Didik Pramanto, 2021).

Dalam pelaksanaannya, program ini menghadirkan 62 ketua RT yang membawahi 308 petugas di setiap lingkungan RT, termasuk warga, kader, dan Cak/Ning Minduk. Seputar jenis pelayanan Administrasi Kependudukan yang dapat dilakukan oleh warga melalui ketua RT. Khususnya Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Indonesia Anak (KIA), Legalisir, Pindah Masuk dan Pindah Keluar, Perubahan Biodata, Cetak ulang KK, Pisah KK, Pemutakhiran Gelar, dan Akta Perkawinan melalui Klampid New Generation (KNG).

Dalam penerapan program kalimasada tersebut di lingkup kelurahan khususnya Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya. Para pegawai kelurahan memberikan pelayanan sayang warga di balai RW setiap hari Selasa malam dan Jumat yang juga merupakan salah satu program Pemkot Surabaya dalam memberikan kemudahan administrasi kependudukan. Program pelayanan sayang warga yang dilakukan ialah memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan informasi-informasi kependudukan yang lebih dekat dengan warga tanpa warga harus pergi ke kantor kelurahan untuk mengurus administrasi kependudukan. Dengan adanya program tersebut pengelolaan administrasi di Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya meningkat dari tahun 2021.

Tidak hanya itu dalam upaya penerapan kalimasada di kelurahan Rungkut Menanggal memberikan pelatihan cara menggunakan aplikasi Klampid New Generation (KNG) sebagai media inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara online sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Para Ketua RT Rintisan Kalimasada diberikan user dan password sebagai akses aplikasi KNG untuk memberikan pelayanan kependudukan. Dalam pelatihan dan sosialisasi kalimasada pada ketua RT. Namun dalam pelaksanaan program kalimasada di balai RW tidak memiliki fasilitas penunjang seperti laptop dan printer dalam

memberikan pelayanan administrasi kependudukan pada warga dan juga para RT Rintisan Kalimasada masih gagap dalam penggunaan teknologi digital.

Maka dari itu para pegawai Kelurahan Rungkut Menanggal dan para mahasiswa magang memberikan pelatihan kepada Ketua RT terkait prosedur pelayanan administrasi kependudukan pada warga dari mulai penerimaan berkas, pengecekan syarat-syarat dokumen permohonan, hingga proses cara menginputkan dokumen-dokumen permohonan kedalam aplikasi KNG. Dan memberikan solusi untuk mengandalkan smartphone mereka untuk dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara online melalui KNG. Sehingga dengan adanya pelatihan kalimasada tersebut warga dapat mengurus administrasi kependudukan dengan mudah melalui Ketua RT setempat tanpa harus pergi ke Disdukcapil maupun kantor Kelurahan. Dengan begitu maka kesadaran masyarakat akan mengurus administrasi kependudukan menjadi meningkat melihat pelayanan kependudukan menjadi lebih mudah dan praktis. Dengan berjalanya program kalimasada di lingkup kelurahan maka akan dapat memudahkan pemerintah pusat untuk membuat program-program kebijakan melalui data-data kependudukan demi mensejahterakan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari hasil dan pembahasan diatas penerapan program Kalimasada sudah berjalan lancar sesuai dengan tujuan diadankanya program ini. Yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepengurusan administrasi kependudukan baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi negara. Terbukti dengan meningkatnya permohonan kepengurusan administrasi kependudukan seperti Pindah Datang, Pindah Keluar, Akta Kematian, Akta Kelahiran, Cetak Ulang KK, KIA, dan Legalisir. Dalam pelaksanaan program Kalimasada ini mengalami beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman Ketua RT Rintisan Kalimasada dalam menggunakan Klampid New Generation (KNG) sebagai inovasi pelayanan kependudukan. Adapun solusinya Disdukcapil Surabaya menugaskan para mahasiswa magang untuk dapat memberikan sosialisasi kalimasada dan pelatihan cara menggunakan KNG sebagai media pengajuan administrasi kependudukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dan Ibu Pegawai Disdukcapil Surabaya dan Kelurahan Rungkut Menanggal atas bantuan dan bimbingannya selama saya magang di Kelurahan. Saya memperoleh banyak keahlian dalam pengelolaan administrasi kependudukan. selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi Studi Ilmu Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing saya terkait saran dan bimbingannya selama proses magang.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 569–586. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Umum
Pemerintah Kota Surabaya. (n.d.). *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya*. Disdukcapil. <https://disdukcapil.surabaya.go.id/>
- Publisher, L. (2022). *TERTIB ADMINDUK : IMPLEMENTASI OPTIMALISASI KALIMASADA*. 2(2), 1–10.
- Risky Didik Pramanto. (2021). *Program Kalimasada Dispendukcapil, DPR SURABAYA :Inovasi Luar Biasa, Dukung!* Faktualnews.Co. <https://faktualnews.co/2021/11/26/program-kalim>
- Setiyawan, Y. (2017). *KESADARAN MASYARAKAT DALAM ADMINITRASI KEPENDUDUKAN (Studi pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tunjungpinang Tahun 2015)*. 1–14.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik